



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKALAN**



RENJA TAHUN 2024

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah – Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra dimaksud disusun dan memuat uraian Tujuan, Sasaran dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, yang perpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 dalam rangka untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian Visi, Misi Sasaran dan Strategis Pembangunan Kabupaten Bangkalan .

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan ini disusun, semoga menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Bangkalan, 21 Juli 2023

KEPALA BPKAD

KAB. BANGKALAN



ABDUL AZIZ, S.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19740729 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PD.....	10
2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	10
2.2. SUMBER DAYA MANUSIA.....	29
2.3. KINERJA PELAYANAN	33
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG.....	35
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	38
3.1. IDENTIFIKASI MASALAH.....	38
3.2. TELAAH VISI MISI KEPALA DAERAH.....	40
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD	40
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	42
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	45
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	47
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VII : PENUTUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis antara lain :

1. Menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
3. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.
4. Dan Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan

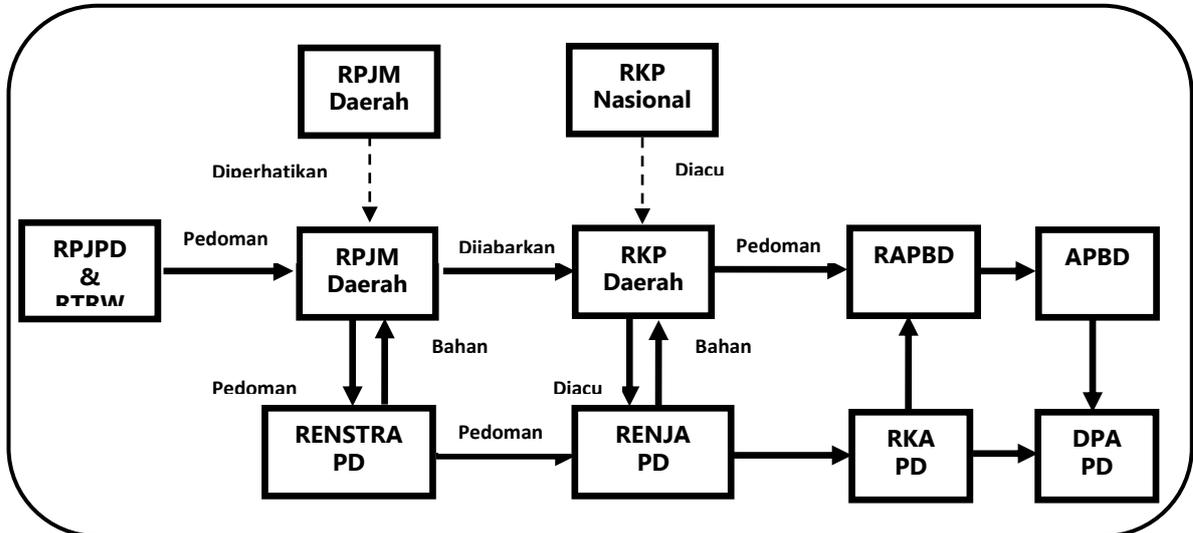
Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Keterkaitan Renja BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1 :

Gambar 1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan



RPJPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi acuan penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 merupakan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 - 2025. RPJMD tahap ketiga melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu mewujudkan Kabupaten Bangkalan Sebagai Kabupaten Industri, Perdagangan dan Jasa yang Tangguh Menuju Terciptanya Masyarakat Madani. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara

langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.

RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 - 2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2018 - 2023 untuk jangka waktu 5 tahun sesuai tugas dan tupoksi BPKAD dan lebih didetailkan lagi melalui Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Selanjutnya Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan RKA - PD (Rencana Kerja Anggaran PD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- h. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587) Perubahan terahir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
- i. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan penelaahan rencana strategis kementerian/lembaga (renstra k/l) 2015-2019
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupate Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/D);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76);
- s. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- t. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana

- Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 7/E);
- u. Surat Edaran Bupati Nomor 000.7.2.4/795/433.201/2023 tentang Pedoman penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
 - v. Perbup Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Bangkalan Tahun 2024

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, antara lain :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan, perencanaan, target capaian dengan pelaksanaannya;
- b. Meningkatkan peran partisipasi aktif pemangku kepentingan dan stake holder dalam proses penyusunan program kegiatan dan perencanaan anggaran;
- c. Menyelaraskan program, kegiatan dengan anggaran;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya;
- e. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang terukur sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan, tujuannya adalah :

- a. Sinkronisasi dan menjabarkan Rencana Strategis - Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per Bab. sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab 3 Tujuan, Sasaran Renja Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Bab 5 Penutup

BAB II

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Dari hasil evaluasi dimaksud sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan APBD, Pengelolaan Aset dan Akuntansi Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi pembangunan di Bidang Pemerintahan dan otonomi daerah, pada Tahun 2022 di titik beratkan pada program utama pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah meliputi 3 (tiga) Program dan 13 (dua belas) Kegiatan dengan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dari program-program diatas, realisasi Belanja Operasi BPKAD pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 51.036.018.219, Belanja Modal BPKAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 694.675.291, Belanja Tidak Terduga BPKAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.139.767.191 dan Belanja Transfer BPKAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 435.623.479.100 atau 98,49% dengan rincian program dan kegiatan antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pagu Program ini sebesar Rp. 52.191.232.683 dan terealisasi sebesar Rp. 48.077.864.689 atau 92,12% yang diterjemahkan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 108.767.000 dan terealisasi sebesar Rp. 93.508.800 atau 85,97% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.780.150 dan terealisasi sebesar Rp. 18.806.500 atau 86,35%
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.733.050 dan terealisasi sebesar Rp. 21.883.000 atau 88,48%
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.806.250 dan terealisasi sebesar Rp. 22.084.000 atau 89,03%

- d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.898.600 dan terealisasi sebesar Rp. 2.766.500 atau 95,44%
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.252.450 dan terealisasi sebesar Rp. 2.395.400 atau 73,65%
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.530.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.738.400 atau 95,73%
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.766.500 dan terealisasi sebesar Rp. 7.835.000 atau 61,37%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 46.626.336.083 dan terealisasi sebesar Rp. 43.831.431.568 atau 94,01% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.566.026.507 dan terealisasi sebesar Rp. 43.774.314.318 atau 94,00%
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.733.626 dan terealisasi sebesar Rp. 37.866.750 atau 95,30%
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.575.950 dan terealisasi sebesar Rp. 19.250.500 atau 93,56%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 19.842.750 dan terealisasi sebesar Rp. 19.403.550 atau 97,79% dan diterjemahkan kedalam sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.645.950 dan terealisasi sebesar Rp. 8.565.850 atau 99,07%
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.196.800 dan terealisasi sebesar Rp. 10.837.700 atau 96,79%
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 95.150.000 dan terealisasi sebesar Rp. 92.972.000 atau 97,71% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.150.000 dan terealisasi sebesar Rp. 27.972.000 atau 92,78%
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 65.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 65.000.000 atau 100%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 565.280.700 dan terealisasi sebesar Rp. 547.329.272 atau 96,82% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.043.650 dan terealisasi sebesar Rp. 10.451.000 atau 94,63%
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 107.893.850 dan terealisasi sebesar Rp. 99.747.450 atau 92,45%

- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.988.000 dan terealisasi sebesar Rp. 39.200.000 atau 93,36%
 - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 129.034.000 dan terealisasi sebesar Rp. 124.596.800 atau 96,56%
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.480.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.300.000 atau 97,22%
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 17.368.800 atau 99,25%
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 226.341.200 dan terealisasi sebesar Rp. 225.022.422 atau 99,42%
 - h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.642.800 atau 98,57%
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 167.226.050 dan terealisasi sebesar Rp. 143.641.125 atau 85,90% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.032.050 dan terealisasi sebesar Rp. 105.263.200 atau 84,19%
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.194.000 dan terealisasi sebesar Rp. 38.377.925 atau 90,96%

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 4.153.765.100 dan terealisasi sebesar Rp. 3.014.517.333 atau 72,57% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.885.100 dan terealisasi sebesar Rp. 2.103.525 atau 26,68%
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 254.850.000 dan terealisasi sebesar Rp. 225.883.716 atau 88,63%
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.891.030.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.786.530.092 atau 71,61%
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 122.365.000 dan terealisasi sebesar Rp. 335.061.041 atau 73,66% dan diterjemahkan kedalam Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 122.365.000 dan terealisasi sebesar Rp. 90.125.424 atau 73,65%
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 128.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 59.489.317 atau 46,76%
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 114.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 114.135.800 atau 99,68%

- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 70.950.500 atau 78,83%
- B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Pagu Program ini sebesar Rp. 443.236.546.038 dan terealisasi sebesar Rp. 440.047.925.117 atau 99,28% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 1.881.656.725 dan terealisasi sebesar Rp. 1.792.288.400 atau 95,25% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.284.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.114.500 atau 86,29%
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.699.500 dan terealisasi sebesar Rp. 50.134.900 atau 95,13%
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.995.200 atau 96,93%
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.995.200 atau 96,93%
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 35.066.500 atau 99,13%
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 28.955.000 atau 81,85%

- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 890.516.000 dan terealisasi sebesar Rp. 847.277.900 atau 95,14%
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 587.585.225 dan terealisasi sebesar Rp. 563.044.700 atau 95,82%
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 153.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 153.087.000 atau 99,67%
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.057.000 dan terealisasi sebesar Rp. 38.462.500 atau 93,68%
 - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.415.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.155.000 atau 85,03%
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 357.422.800 dan terealisasi sebesar Rp. 281.850.736 atau 78,86% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.029.900 dan terealisasi sebesar Rp. 13.029.900 atau 100,00%
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.590.200 dan terealisasi sebesar Rp. 14.590.200 atau 100,00%

- c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.595.100 dan terealisasi sebesar Rp. 15.545.100 atau 99,68%
- d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.385.500 dan terealisasi sebesar Rp. 23.601.500 atau 96,78%
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK) , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 106.066.850 dan terealisasi sebesar Rp. 94.407.786 atau 89,01%
- f. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.272.300 dan terealisasi sebesar Rp. 9.587.300 atau 58,92%
- g. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.214.250 dan terealisasi sebesar Rp. 15.914.250 atau 92,45%
- h. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.268.700 dan terealisasi sebesar Rp. 95.174.700 atau 63,34%

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 328.940.800 dan terealisasi sebesar Rp. 210.539.690 atau 64,01% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.423.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.623.762 atau 75,21%
 - b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 141.467.850 dan terealisasi sebesar Rp. 95.247.050 atau 67,33%
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 160.049.950 dan terealisasi sebesar Rp. 94.668.878 atau 59,15%
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 440.668.525.713 dan terealisasi sebesar Rp. 437.763.246.291 atau 99,34% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 430.308.225.700 dan terealisasi sebesar Rp. 428.900.081.100 atau 99,67%
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.551.220.013 dan terealisasi sebesar Rp. 2.139.767.191 atau 60,25%

- c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.809.080.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.723.398.000 atau 98,74%
- C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pagu Program ini sebesar Rp. 1.560.354.575 dan terealisasi sebesar Rp. 1.368.149.995 atau 87,68% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
- 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 1.560.354.575 dan terealisasi sebesar Rp. 1.368.149.995 atau 87,68% yang diterjemahkan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Standar Harga, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 276.712.350 dan terealisasi sebesar Rp. 271.004.600 atau 97,94%
 - b. Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.530.650 dan terealisasi sebesar Rp. 26.920.100 atau 97,78%
 - c. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 891.254.275 dan terealisasi sebesar Rp. 742.391.016 atau 83,30%
 - d. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.652.450 dan terealisasi sebesar Rp. 42.872.250 atau 96,61%
 - e. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 218.582.550 dan terealisasi sebesar Rp. 184.332.779 atau 85,50%
 - f. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp.

104.622.300 dan terealisasi sebesar Rp. 100.629.250
atau 46,68%

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020										
5.02	KEUANGAN									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100,00%	21,43%	25,01%	25,01%	100,00%	27,64%	74,08%	74,08%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100,00%	19,40%	35,82%	35,82%	100,00%	34,33%	89,55%	89,55%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100,00%	4 Dok	12 Dok	100,00%
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%

5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dok	3 Dok	4 Dok	4 Dok	100,00%	3 Dok	10 Dok	142,86%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100,00%	8 Laporan	16 Laporan	66,67%
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	33,3%	100%	100,00%
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan tunjangan dan gajinya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100,00%	4 Dok	12 Dok	100,00%
5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100,00%	29,17%	12,50%	12,50%	100,00%	31,25%	72,92%	72,92%
5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42 Dok	14 Dok	5 Dok	5 Dok	100,00%	14 Dok	33 Dok	78,57%
5.02.01.02.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dok		1 Dok	-	-			
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100,00%	0,09%	8,34%	7,39%	88,64%	6,73%	14,22%	14,22%
5.02.01.02.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	210 Buah		70 Buah	63 Buah	90%	-	63 Buah	30,00%

		Disiplin Pegawai								
5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210 Buah		70 Buah	-	-	-	-	
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	2 Laporan	66,67%
5.02.01.02.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan		1 Laporan	-	-			
5.02.01.02.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	140 Orang		70 Orang	-	-			
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210 Orang		18 Orang	15 Orang	83%	2 Orang	17 Orang	8,10%
5.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang		70 Orang	-	-	67 Orang	67 Orang	47,86%
5.02.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang		70 Orang	-				
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100,00%	25,06%	36,77%	36,77%	100,00%	37,94%	99,77%	99,77%
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	150 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100,00%	50 Unit	150 Unit	100,00%
5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00%	2 Jenis	6 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	1 Paket	3 Paket	100,00%

5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kali	50 Kali	100 Kali	100 Kali	100,00%	100 Kali	250 Kali	100,00%
5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Laporan		2 Laporan		-	6 Laporan	6 Laporan	100,00%
5.02.01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	100,00%		2 Sistem	66,67%
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase BMD yang terpenuhi	100,00%	0,00%	15,79%	15,79%	100,00%	13,16%	28,95%	28,95%
5.02.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		10 Unit	10 Unit	100,00%	-	10 Unit	50,00%
5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	48 Unit		16 Unit	-	-	10 Unit	10 Unit	20,83%
5.02.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Jenis		1 Jenis			-	-	
5.02.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	100,00%	-	2 Unit	50,00%
5.02.01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	-		-	-	
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100,00%	35,29%	29,41%	29,41%	100,00%	35,29%	100,00%	100,00%
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	1 Jenis	3 Jenis	100,00%
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100,00%	3 Jenis	8 Jenis	100,00%
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	2 Unit	6 Unit	100,00%
5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	29,07%	29,07%	29,07%	100,00%	29,07%	87,22%	87,22%

5.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100,00%	14 Unit	42 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100,00%	17 Unit	51 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		25 Unit					
5.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100,00%	100 Unit	300 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Jenis		1 Jenis					
5.02.01.02.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Jenis		1 Jenis					
5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	3 Unit	100,00%
5.02.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	-		-		
5.02.01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Jenis		1 Jenis	-		-		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100,00%	19,44%	24,65%	24,65%	100,00%	25,28%	69,37%	69,37%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100,00%	27,08%	29,17%	29,17%	100,00%	33,33%	91,67%	91,67%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Kali		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Kali	66,67%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Kali		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Kali	66,67%

5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3 Kali		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Kali	66,67%
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3 Dok	1 Dok	2 Dok	-	-	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	16,67%	33,33%	33,33%	100,00%	33,33%	83,33%	83,33%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%

5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dok		2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	4 Dok	66,67%
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	6 Dok	100,00%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100,00%	0,67%	0,67%	0,67%	100,00%	1,12%	1,12%	2,47%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dok		1 Dok	-	-	-	-	-
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dok		1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	33,33%

5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	3 Dok	100,00%
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok		1 Dok	-		-	-	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok		1 Dok	-		-	-	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dok		1 Dok	-		1 Dok	1 Dok	33,33%
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dok		1 Dok	-		-	-	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	421 Orang		141 Orang	-		-	-	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	33,33%	100,00%	100,00%
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	14,90%	15,14%	15,14%	100,00%	15,14%	45,18%	45,18%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100,00%	14,90%	15,14%	15,14%	100,00%	15,14%	45,18%	45,18%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	2 Dok	5 Dok	100,00%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100,00%	1 Dok	2 Dok	66,67%
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	14 Dok & 568 Sertifikat	4 Dok	5 Dok & 284 Sertifikat	5 Dok & 49 Sertifikat	100,00%	5 Dok	14 Dok	100,00%
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	42 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100,00%	14 Dok	42 Dok	100,00%
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	12 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100,00%	4 Dok	12 Dok	100,00%
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1179 Orang	164 Orang	164 Orang	164 Orang	100,00%	164 Orang	492 Orang	41,73%
Jumlah			100,00%	18,59%		21,60%		22,69%	62,88%	62,88%

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Secara umum perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perubahan atau pergeseran pagu anggaran sehingga beberapa pagu anggaran sub kegiatan harus disubstitusikan pada sub kegiatan lainnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 yang tercantum pada tabel 2.1 dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 4 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja yang mana dari seluruh kegiatan tersebut masing-masing sub kegiatan berhasil memenuhi target kinerja sebesar 100%.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, 5 sub kegiatan telah memenuhi target sebesar 100% dan 1 sub kegiatan lainnya berhasil memenuhi target namun masih terdapat kekurangan dalam dokumen yang dihasilkan. Pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah telah mencapai target sebanyak 5 Dokumen. Di dalam dokumen tersebut seharusnya terdapat 284 sertifikat yang harus dipenuhi namun pada tahun 2022 hanya terealisasi sebanyak 49 Sertifikat. Hal tersebut disebabkan

karena jarak antar lokasi yang dituju sangatlah jauh dan kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan teknis kegiatan sehingga pegawai harus berlomba dengan waktu dalam memenuhi penyelesaian target tersebut.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Dari 31 sub kegiatan pada program ini terdapat 29 sub kegiatan yang berhasil memenuhi target sebesar 100%, sedangkan 2 sub kegiatan tidak memenuhi target yaitu sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan target sebesar 70 buah dan realisasi kinerja sebesar 63 buah sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 90% dan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target kinerja 18 orang dan realisasi kinerja sebesar 15 orang sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 83%. Realisasi kinerja pada 2 sub kegiatan tersebut disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan pada saat pelaksanaan teknis kegiatan sehingga terdapat selisih atau perbedaan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dari 3 program dan 14 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja tahun 2022.

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Untuk memenuhi target kinerja dalam pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun 2022 terdapat faktor-faktor pendukung dan

penghambat pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah faktor pendukung keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai realisasi kinerja yaitu :

- 1) Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan
- 2) Komitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) dan aplikasi lainnya sehingga mampu mengkoordinasikan OPD dalam melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan pengelolaan BMD yang tertib administrasi
- 3) Konsistensi dalam pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- 4) Adanya kerjasama yang terarah, terukur dan inovatif sehingga menciptakan inovasi-inovasi di dalam pelaksanaan program,
- 5) Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022.

Adapun faktor penghambat keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam memenuhi realisasi kinerja yaitu :

- 1) Belum sempurnanya aplikasi yang digunakan sehingga sering kali terjadi *error system* yang menghambat kegiatan operasional instansi
- 2) Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Secara umum penyebab rendahnya tingkat capaian kinerja program/kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah adalah adanya *recofusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam upaya penanganan Pandemi *covid-19* sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai Rencana Kerja pada tahun 2021 karena terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan. Adapun implikasi capaian kinerja renja tahun 2022 terhadap capaian kinerja Renstra 2018-2023 adalah mendorong tingkat capaian renstra sebesar 21,60% dari seluruh program/kegiatan dengan rincian capaian kinerja pada program pengelolaan keuangan daerah sebesar 24,65%, program pengelolaan barang milik daerah sebesar 15,14% dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar 25,01%.

Pada program pengelolaan keuangan khususnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memperoleh capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra 2023 melebihi target Renstra yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian kebutuhan dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sehingga pada akhir periode Renstra 2018-2023 diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 142,86% dengan target sebanyak 7 laporan dan realisasi kinerja sebanyak 10 laporan.

- e. Kebijakan/tindakan yang timbul terhadap perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan tabel 2.1 hasil evaluasi Renja tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran diperlukan adanya analisis secara menyeluruh mengenai penetapan anggaran prioritas, *mandatory* dan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Kebutuhan sarana dan prasarana yang menjadi penting adalah pengadaan atau pemeliharaan AC (*Air Conditioner*) di ruang rapat BPKAD guna mendukung konsentrasi dan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan kegiatan rapat kerja. Selain itu BPKAD belum memiliki ruang arsip sebagai tempat penyimpanan dokumen, sementara itu beberapa gedung di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan di Jl. Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan tidak digunakan sehingga perlu adanya realokasi anggaran beberapa kegiatan untuk dapat mengalih fungsikan gedung tersebut menjadi gudang arsip BPKAD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sebagai Unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan dalam pengelola keuangan dan aset daerah yang dapat mengakomodasi perubahan sumber daya yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi yang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program.

Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan program tingkat Pemerintah Kabupaten Bangkalan menjadi mutlak.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah Secara substansial memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan terpadu.

Sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan normatif, bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBD yang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran / hasil dari kegiatan dan program yang akan atau telah dicapai dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, dalam hal ini setiap dana yang dianggarkan untuk kegiatan/program harus terukur secara jelas indikator kinerja yang direpresentasikan kedalam tolok ukur

kinerja serta target/ sasaran yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana yang terpadu dimana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara integrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) secara bertahap dan berkesinambungan. Hal tersebut antara lain :

1. Perlu upaya melibatkan masyarakat dalam proses Pembangunan Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran ;
2. Pengendalian pelaksanaan anggaran untuk menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Upaya mempercepat proses desentralisasi manajemen pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah ;
3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelola keuangan tersebut adalah bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi semangat dominan dan mewarnai penyelenggaraan pemerintahan utamanya dalam mengelola keuangan daerah. Terkait dengan hal diatas, Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyusun dokumen APBD sebagai refleksi dari sasaran prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
 - c. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS).

Yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dengan hasil Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sebagai landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dimana secara aplikatif akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai manifestasi kepala Perangkat Daerah.

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, peningkatannya diupayakan melalui jalur formal dan jalur non formal.

Dalam upaya efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti study banding, undangan dalam rangka workshop, seminar dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah supaya dilakukan secara tertib agar tidak membebani biaya perjalanan dinas dan disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangkalan.

Pengelolaan dan pendayagunaan Barang Daerah dilaksanakan secara tertib dan optimal dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut;

- a. Setiap Perangkat Daerah wajib mencatat seluruh aset yang pengadaannya diperoleh dari APBD Kabupaten maupun sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penyerahan aset hasil Belanja Langsung harus dilakukan dengan berita acara Penyerahan yaitu dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyerahkan kepada Bupati Bangkalan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan mencatat sebagai inventaris Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan selanjutnya inventarisasi terhadap seluruh aset dilakukan secara tertib dan berlanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. Untuk menghindari penurunan kemampuan produktifitas dan usia teknis sarana dan prasarana yang telah dibangun, maka penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan yang disediakan hendaknya didasarkan kepada hasil inventarisasi aset yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, oleh karena itu inventaris terhadap setiap barang baik yang telah ada maupun yang baru dibeli harus dicatat dengan tertib dan dilaporkan secara berkala, sedangkan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melakukan inventarisasi aset perlu lebih meningkatkan ketertiban ;

- d. Dalam upaya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran belanja, maka efisiensi pemeliharaan kendaraan bermotor ditingkatkan, disamping itu dilakukan langkah-langkah penertiban penggunaan kendaraan dinas operasional secara efektif.
- e. Penyediaan belanja barang harus didasarkan kepada Rencana Kebutuhan Barang Umum Daerah yang benar-benar sangat diperlukan dan tidak bergaya mewah, selanjutnya belanja barang harus didasarkan juga pada Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU)

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2018-2023				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan			100%	100%			100%	100%			
2	Persentase PD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan			100%	100%			100%	100%			
3	Persentase Peningkatan PD yang tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%	100%			100%	100%			
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2028				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					WTP	WTP			WTP	WTP	
1	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu					Sesuai	Sesuai			Sesuai	Sesuai	
2	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya					2,50	2,30			2,50	2,30	
3	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal					100%	100%			100%	100%	
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah					70,00	75,00			70,00	75,00	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat					92,00	93,00			92,00	93,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijakan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu system operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan dan pengembangan yang akan dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, untuk kedepan dibutuhkan solusi – solusi yang strategis.

Adapun permasalahan secara umum yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam tata kelola keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan;

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya

sarana dan prasarana yang memadai. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja. Agar kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan;

- 3) Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Kurang tertibnya administrasi dari petugas pengelola keuangan dan barang milik daerah mengakibatkan terganggunya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja penghapusan aset di setiap Perangkat Daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD)

- 4) Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah

Beban kerja yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Bangkalan mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal sehingga dibutuhkan sumber daya manusia baru guna memudahkan tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD sekaligus PPKD Kabupaten Bangkalan

- 5) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih belum dilakukan integrasi dengan menggunakan sistem aplikasi yang basis datanya berbeda. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah maka diperlukan integrasi aplikasi keuangan dan barang milik daerah.

- 6) Belum terwujudnya sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang berbasis teknologi informasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki tugas untuk melayani dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk SKPD di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan adanya pengembangan teknologi informasi guna mempersingkat waktu pelayanan. Sehingga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Permasalahan yang belum diselesaikan pada periode tiga tahun sebelumnya menjadi isu strategis yang memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di periode tiga tahun mendatang. Maka isi-isu strategis utama yang perlu diperhatikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Perlu adanya peningkatan sistem pada SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
2. Perlu adanya Peningkatan kualitas SDM dalam proses Penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
3. Perlu adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.4 Review terhadap RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, menetapkan prioritas pembangunan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bangkalan	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	1.964.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bangkalan	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	1.964.000.000	
			Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	417.791.137.207			Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	417.791.137.207	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bangkalan	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100%	1.964.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Bangkalan	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100%	1.964.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	53.139.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dok	53.139.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	53.139.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	53.139.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	17.750.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	17.750.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	17.750.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	17.750.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	38.915.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	38.915.000	

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	38.915.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dok	38.915.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	596.303.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	596.303.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	572.166.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	572.166.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dok	522.690.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dok	522.690.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dok	37.368.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dok	37.368.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dok	10.115.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dok	10.115.000	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dok	5.750.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dok	9.750.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	149.788.750	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	149.788.750	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dok	13.354.650	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dok	13.354.650	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dok	12.550.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dok	12.550.000	

	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dok	1.063.550	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dok	1.063.550	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dok	26.115.250	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dok	26.115.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1.054.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	1.054.100	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dok	1.049.900	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dok	1.049.900	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dok	13.520.450	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dok	13.520.450	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dok	81.080.850	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dok	81.080.850	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	312.683.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Bangkalan	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	312.683.500	

	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dok	26.900.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dok	26.900.000	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	36.015.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	36.015.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	107.816.200	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	107.816.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dok	129.154.900	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dok	129.154.900	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	12.797.400	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	12.797.400	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bangkalan	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	417.328.664.957	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bangkalan	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	417.328.664.957	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	406.666.376.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	406.666.376.000	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	3.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	3.000.000.000	

	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	7.662.288.957	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	7.662.288.957	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bangkalan	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	940.120.194	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bangkalan	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	940.120.194	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	100%	940.120.194	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	100%	940.120.194	
	Penyusunan Standar Harga	Bangkalan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dok	273.442.750	Penyusunan Standar Harga	Bangkalan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dok	273.442.750	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan	18.507.500	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan	18.507.500	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dok	520.120.194	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dok	520.120.194	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	14 Laporan	28.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	14 Laporan	28.000.000	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	77.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	77.000.000	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	164 Org	23.049.750	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	164 Org	23.049.750	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bangkalan	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	37.573.641.069	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bangkalan	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	37.573.641.069	

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	92.400.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%	92.400.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	12.400.0000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	12.400.0000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	17.000.0000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	17.000.0000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	17.000.0000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	17.000.0000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	17.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	17.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	100%	32.705.963.319	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	100%	32.705.963.319	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	32.681.963.319	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	32.681.963.319	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	2 Laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	2 Laporan	12.000.000	

			Tahun SKPD					Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	12.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bangkalan	Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	100%	14.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bangkalan	Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	100%	14.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	7.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	7.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	7.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	7.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	25.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	7.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	7.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bangkalan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 org	11.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bangkalan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 org	11.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 org	7000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bangkalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 org	7000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%	418.813.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bangkalan	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%	418.813.650	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.000.000	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	80.116.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	80.116.250
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	130.960.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	130.960.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.300.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	11.550.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bangkalan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	11.550.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	135.827.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	135.827.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dok	3.560.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dok	3.560.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	131.714.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	131.714.100
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	131.714.100	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Bangkalan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	131.714.100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	3.555.470.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	3.555.470.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	7.020.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	7.020.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	269.850.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	269.850.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.278.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.278.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	630.280.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	630.280.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	140.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bangkalan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	140.150.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	105.030.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	105.030.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	265.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	265.100.000	
Jumlah					458.268.898.470					458.268.898.470	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan disamping itu penyusunan program dan kegiatan telah dikaitkan dengan isu-isu penting tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan, maka BPKAD Kabupaten Bangkalan untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2024 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bangkalan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			NIHIL		

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun (SPPN), rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja-PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tidak terlepas dari amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 77 /PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87 /Pmk.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 77 /PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 dengan

mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat , Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Adapun upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Adapun 7 agenda pembangunan dalam mendukung misi pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tujuh (7) agenda tersebut sesuai dengan Proritas Pembangunan Nasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

“Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing”. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana diharapkan. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang diemban, tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan harus selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur **“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”** dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan menyusun rancangan tujuan pembangunan Daerah yang terdiri dari:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Menurunkan angka kemiskinan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung oleh peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan

berpedoman pada prioritas pembangunan kabupaten Bangkalan yaitu peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan ketentraman ketertiban umum, tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah **“Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan				Sasaran				Ket.
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Target		
		2024	2025			2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	
					Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2.50	2.30	
					Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	100%	
				Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.00	75.00	
					Indeks Kepuasan Masyarakat	92.00	93.00	

3.3 Program dan Kegiatan

Wabah Covid-19 sejak tahun 2020 memberikan dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan khususnya dalam aspek kesehatan dan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam menghadapi situasi yang dinamis tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan respon yang adaptif dalam menentukan langkah-langkah yang diambil, sehingga tercipta kebijakan terbaik dalam menangani permasalahan tersebut. Secara garis besar, terdapat dua dimensi utama dalam memberikan stimulus penanganan covid-19 yaitu penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi. Dalam rangka menangani permasalahan ekonomi, kementerian keuangan mengusulkan strategi kebijakan berupa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga program/kegiatan pemerintah daerah harus integral dengan kebijakan ekonomi nasional.

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi nasional dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif, disebutkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah hanya terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bangkalan, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada BPKAD Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	Bangkalan	100%	1.964.000.000	DAUM		100%	2.001.620.194
		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP		100%	417.791.137.207	DAUM		100%	416.954.648.825
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	Bangkalan	100%	1.964.000.000	DAUM		100%	2.001.620.194
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Bangkalan	2 Dok	53.139.000	DAUM		2 Dok	60.139.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	53.139.000	DAUM		2 Dok	60.139.000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	17.750.000	DAUM		1 Dok	20.750.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	17.750.000	DAUM		1 Dok	20.750.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	38.915.000	DAUM		1 Dok	40.915.000
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Bangkalan	1 Dok	38.915.000	DAUM		1 Dok	40.915.000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Bangkalan	2 Dok	596.303.000	DAUM		2 Dok	600.303.000

5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bangkalan	2 Dok	572.166.000	DAUM		2 Dok	572.786.194
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Bangkalan	1 Dok	522.690.000	DAUM		1 Dok	522.690.000
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Bangkalan	1 Dok	37.368.000	DAUM		1 Dok	39.368.000
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Bangkalan	1 Dok	10.115.000	DAUM		1 Dok	16.115.000
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Bangkalan	1 Dok	5.750.000	DAUM		1 Dok	9.750.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	Bangkalan	100%	149.788.750	DAUM		100%	189.688.750
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Bangkalan	2 Dok	13.354.650	DAUM		2 Dok	20.354.650
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Bangkalan	2 Dok	12.550.000	DAUM		2 Dok	18.550.000
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Bangkalan	2 Dok	1.063.550	DAUM		2 Dok	5.663.550
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Bangkalan	2 Dok	26.115.250	DAUM		2 Dok	30.115.250
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Bangkalan	1 Laporan	1.054.100	DAUM		1 Laporan	5.754.100
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	Bangkalan	1 Dok	1.049.900	DAUM		1 Dok	5.649.900

	Optimalisasi Kas	Optimalisasi Kas							
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Bangkalan	2 Dok	13.520.450	DAUM		2 Dok	18.520.450
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Bangkalan	2 Dok	81.080.850	DAUM		2 Dok	85.080.850
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	Bangkalan	100%	312.683.500	DAUM		100%	357.683.500
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Bangkalan	1 Dok	26.900.000	DAUM		1 Dok	35.900.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Bangkalan	1 Laporan	36.015.000	DAUM		1 Laporan	45.015.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Bangkalan	1 Laporan	107.816.200	DAUM		1 Laporan	115.816.200
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Bangkalan	1 Dok	129.154.900	DAUM		1 Dok	135.154.900
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bangkalan	1 Dok	12.797.400	DAUM		1 Dok	25.797.400
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	Bangkalan	100%	417.328.664.957	DAUM		100%	416.407.276.575
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bangkalan	4 Laporan	406.666.376.000	DAUM		4 Laporan	403.695.564.000

5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Bangkalan	2 Laporan	3.000.000.000	DAUM		2 Laporan	5.000.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Bangkalan	4 Laporan	7.662.288.957	DAUM		4 Laporan	7.711.712.575
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	Bangkalan	100%	940.120.194	DAUM		100%	1.471.069.955
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	Bangkalan	100%	940.120.194	DAUM		100%	1.471.069.955
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Bangkalan	2 Dok	273.442.750	DAUM		2 Dok	278.442.750
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Bangkalan	14 Laporan	18.507.500	DAUM		14 Laporan	25.507.500
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Bangkalan	4 Dok	520.120.194	DAUM		4 Dok	1.020.000.000
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Bangkalan	14 Laporan	28.000.000	DAUM		14 Laporan	31.069.955
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Bangkalan	4 Laporan	77.000.000	DAUM		4 Laporan	85.000.000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangkalan	164 Org	23.049.750	DAUM		164 Org	31.049.750
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bangkalan	100%	37.573.641.069	DAUM		100%	37.901.171.114
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	Bangkalan	100%	92.400.000	DAUM		100%	115.400.000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bangkalan	2 Dok	12.400.0000	DAUM		2 Dok	15.400.0000
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	17.000.0000	DAUM		1 Dok	20.000.0000
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Bangkalan	1 Dok	17.000.0000	DAUM		1 Dok	20.000.0000

		RKA-SKPD							
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	7.000.000	DAUM		1 Dok	11.000.000
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bangkalan	1 Dok	7.000.000	DAUM		1 Dok	11.000.000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bangkalan	6 Laporan	15.000.000	DAUM		6 Laporan	18.000.000
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bangkalan	8 Laporan	17.000.000	DAUM		8 Laporan	20.000.000
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan PD terlayani tepat waktu	Bangkalan	100%	32.705.963.319	DAUM		100%	32.812.963.319
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bangkalan	51 Orang/bulan	32.681.963.319	DAUM		51 Orang/bulan	32.772.963.319
5.02.01.02.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bangkalan	2 Laporan	12.000.000	DAUM		2 Laporan	20.000.000
5.02.01.02.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bangkalan	4 Laporan	12.000.000	DAUM		4 Laporan	20.000.000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	Bangkalan	100%	14.000.000	DAUM		100%	18.000.000
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Bangkalan	1 Dok	7.000.000	DAUM		1 Dok	10.000.000
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bangkalan	14 Laporan	7.000.000	DAUM		14 Laporan	8.000.000
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	Bangkalan	100%	25.000.000	DAUM		100%	43.000.000
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bangkalan	1 Dok	7.000.000	DAUM		1 Dok	8.000.000

5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bangkalan	2 org	11.000.000	DAUM		2 org	20.000.000
5.02.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Bangkalan	67 org	7000.000	DAUM		67 org	15.000.000
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	Bangkalan	100%	418.813.650	DAUM		100%	551.100.450
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 Paket	13.000.000	DAUM		4 Paket	20.000.000
5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bangkalan	18 Paket	80.116.250	DAUM		18 Paket	177.116.250
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	35.500.000	DAUM		1 Paket	40.500.000
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bangkalan	1 Paket	130.960.400	DAUM		1 Paket	130.960.400
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	Bangkalan	1 Dok	8.300.000	DAUM		1 Dok	10.300.000
5.02.01.02.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bangkalan	4 Laporan	11.550.000	DAUM		4 Laporan	15.550.000
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkalan	4 Laporan	135.827.000	DAUM		4 Laporan	150.827.000
5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bangkalan	2 Dok	3.560.000	DAUM		2 Dok	5.846.800
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Bangkalan	100%	131.714.100	DAUM		100%	209.547.300
5.02.01.02.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Bangkalan	10 Unit	131.714.100	DAUM		10 Unit	209.547.300
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	Bangkalan	100%	3.555.470.000	DAUM		100%	3.420.950.000
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bangkalan	4 Laporan	7.020.000	DAUM		4 Laporan	7.500.000
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bangkalan	4 Laporan	269.850.000	DAUM		4 Laporan	134.850.000
5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bangkalan	4 Laporan	3.278.600.000	DAUM		4 Laporan	3.278.600.000

5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Bangkalan	100%	630.280.000	DAUM		100%	730.210.045
5.02.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bangkalan	22 Unit	120.000.000	DAUM		22 Unit	120.000.000
5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bangkalan	51 Unit	140.150.000	DAUM		51 Unit	150.000.000
5.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bangkalan	167 Unit	105.030.000	DAUM		167 Unit	120.210.045
5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bangkalan	1 Unit	265.100.000	DAUM		1 Unit	340.000.000
Jumlah					458.268.898.470		Jumlah		458.328.510.088

Berdasarkan tabel 4.1 di atas yang menjadi prioritas berdasarkan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi prioritas adalah kegiatan dari bidang anggaran dan kegiatan dari bidang akuntansi dan perbendaharaan. Kegiatan dari bidang anggaran yang menjadi prioritas yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp.596.303.000,- serta Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp.572.166.000,-. Sub kegiatan tersebut menjadi prioritas karena APBD yang tersusun menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja.

Adapun kegiatan dari bidang akuntansi dan perbendaharaan yang menjadi prioritas yaitu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu sebesar Rp.107.816.200,-. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi prioritas sebab LKPD merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur capaian kinerja dan

realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi prioritas adalah kegiatan dari bidang administrasi aset pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 520.120.194,-. Sub kegiatan ini menjadi prioritas karena pentingnya legalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya sengketa tanah dan mengoptimalkan pengelolaan tanah sebagai aset milik pemda untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekapitulasi tanah dalam rangka legalisasi atau sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan

No.	Tahun	Akumulasi Sertifikat	Sertifikat	Akumulasi Bidang Bertsertifikat	Bidang Belum Bersertifikat	Target Sertifikasi Bidang	Jumlah Aset (Bidang)
1.	2022	520	47	441	1229	156	1826
2.	2023	567	57	597	1172	57	1826
3.	2024	624	290	654	882	290	1826
4.	2025	914	441	944	441	441	1826
5.	2026	1355	441	1385	0	441	1826

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat perbedaan antara target bidang yang disertifikasi dengan jumlah sertifikat. Perbedaan tersebut terjadi karena 34 bidang atau tanah yang merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diusulkan menjadi 4 sertifikat. Pada tahun 2023-2026 rincian target sertifikasi bidang direncanakan selaras dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis BPKAD Tahun 2024-2028, berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangkalan 2024-2028, sehingga tahun ini merupakan awal perencanaan target kinerja.

Target kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dicantumkan dalam RPJMD berkaitan dengan Tingkat Kinerja yang ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program PD secara umum dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Penetapan Renja PD yang berada dipertengahan tahun anggaran memiliki rentang waktu yg cukup lama dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hal ini tentunya memberikan peluang adanya pergeseran atau perubahan rencana yang akan dilakukan pada proses penganggaran dalam RAPBD. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal di Kabupaten Bangkalan, antara lain :

- a. Perubahan kebijakan atau Peraturan dan Perundangan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat;
- c. Ketersediaan anggaran yang tersedia;
- d. Dan beberapa hal lain yang mempengaruhi kebijakan penganggaran.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Bangkalan tahun 2024, kami sampaikan banyak terima kasih semoga

dokumen rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024 bermanfaat sebagaimana mestinya

Bangkalan, 21 Juli 2023

**KEPALA BPKAD
KABUPATEN BANGKALAN**



ABDUL AZIZ, S.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740729 200312 1 006